

ABSTRAK

Tindak pidana dengan modus ekonomi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia hal ini dapat diperparah apabila menjadi tindak pidana transnasional yang mana pelaku memindah tangankan hasil kejahatan yang bertujuan supaya hasil dari tindak pidana yang diperoleh tidak dapat ditemukan oleh penegak hukum yang berwenang, hal ini dapat diatasi dengan menerapkan perampasan aset kepada pelaku, namun di Indonesia banyak permasalahan terkait perampasan aset ini dimana perampasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. hal ini menjadi penghambat dari jalannya proses hukum yang ada di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menganalisi data yang didapat dari kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang yang terkait, maupun penelitian yang ada sebelumnya. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana pentingnya Rancangan Undang-Undang yang terdapat konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* bagi kemajuan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan melihat maupun membandingkan dengan negara lain yang sudah menerapkan konsep tersebut seperti Australia dan Thailand

Kata kunci : urgensi, perampasan aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

ABSTRACT

Crime with an economic model is a crime that often occurs in Indonesia, this can be exacerbated if it becomes a transnational crime in which the perpetrator transfers the proceeds of the crime with the aim that the proceeds of the crime obtained cannot be found by authorized law enforcement, this can overcome by implementing the seizure of assets to the perpetrators, but in Indonesia, there are many problems related to the seizure of these assets where the confiscation can only be carried out after obtaining permanent legal force by the court. this is an obstacle to the legal process in Indonesia.

The type of research used in this research is normative research which is carried out by analyzing data obtained from the literature such as books, journals, related laws, and previous research. The analysis is carried out by looking at the importance of the Draft Law which contains the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture for the progress of the legal system in Indonesia by looking at and comparing it with other countries that have implemented the concept such as Australia and Thailand.

Keywords: *urgency, asset confiscation, Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “URGENSI UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA (PERBANDINGAN HUKUM: AUSTRALIA DAN THAILAND)” ini dengan baik.

Bersamaan dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Tolib Effendi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini
2. Seluruh Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Trunojoya Madura
3. Kedua Orang Tua dan keluarga besar penulis yang terus memberikan semangat serta doa sehingga telah menyelesaikan Skripsi ini dengan baik
4. Rekan-rekan dan seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Seluruh pihak yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini terutama kepada saudari Nindah Azimatul Ismiah yang telah memberikan dukungan mental, materi maupun hal-hal lainnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kata sempurna. Namun penulis

berharap penelitian ini dapat di sempurnakan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan bagi kita semua.

Bangkalan, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.4 Metode Analisa Data	14
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN HASIL TINDK PIDANA DI INDONESIA.....	16
2.1 Sistem Pemidanaan.....	16
2.2 Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.....	20
2.3 Pengaturan Internasional Tentang Perampasan Aset	24
2.4 <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	32

BAB III	39
URGENSI UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA (PERBANDINGAN HUKUM: AUSTRALIA DAN THAILAND)	39
3.1 Arti penting perampasan aset bagi penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia	39
3.2 Arti Penting Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia	54
BAB IV	63
PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67